

PEMBREDELAN SURAT KABAR PIKIRAN RAKJAT TAHUN 1965

THE BANNING OF PIKIRAN RAKJAT NEWSPAPER IN 1965

Trisna Awaludin Harisman¹,
Raden Muhammad Mulyadi², Widyo Nugrahanto³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran,
Jalan Raya Bandung Sumedang km. 21

e-mail: trisnakakashi@rocketmail.com¹; r.m.mulyadi@unpad.ac.id²;
widyonugrahanto@unpad.ac.id³

Naskah Diterima: 8 Mei 2019

Naskah Direvisi: 4 April 2020

Naskah Disetujui : 18 April 2020

DOI: 10.30959/patanjala.v12i1.528

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui latar belakang pembredelan surat kabar Pikiran Rakjat pada 1965 setelah munculnya peraturan bagi pers untuk berafiliasi dengan partai atau organisasi politik tertentu. Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah kritis yang terdiri dari empat tahapan kerja: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada awal tahun 1965, kegiatan pers surat kabar Pikiran Rakjat sempat diberhentikan oleh pemerintah disebabkan terlambatnya surat kabar ini untuk terlibat dalam aktivitas politik. Pada 24 Maret 1966 atas dorongan Pangdam Siliwangi para wartawan yang diwakili Sakti Alamsyah sepakat untuk melakukan kerjasama untuk menerbitkan surat kabar Angkatan Bersenjata Edisi Jawa Barat. Belum setahun surat kabar ini terbit, Kementerian Penerangan mencabut kembali peraturan tentang afiliasi dalam dunia politik. Kondisi ini menyebabkan pada 24 Maret 1967 surat kabar Angkatan Bersenjata Edisi Jawa Barat berubah nama menjadi Harian Umum Pikiran Rakjat dibawah pemimpin umum redaksi yaitu Sakti Alamsyah.

Kata kunci: Sakti Alamsyah Siregar, politik, Surat Kabar Pikiran Rakyat.

Abstract

The purpose of this study is to determine the background to the banning of the Pikiran Rakjat Newspaper in 1965. The ban came after the government issued a regulation of requiring the press to be affiliated with certain political parties or organizations. This study uses a critical historical research method consisting of four stages of work, namely heuristics, source criticism, interpretation, and historiography. The results of this study show evidence that in the beginning of 1965 the government banned the newspaper because it was considered too late to engage in political activity. At the instigation of Commander of Military Regional Command/Siliwangi, it was on 24 March 1966 that journalists represented by Sakti Alamsyah agreed to cooperate in publishing Angkatan Bersenjata Newspaper West Java edition. However, when it was not yet a year old, the Ministry of Information revoked the regulations on obligating the press to affiliate with the political world. It was on March 24, 1967 that Angkatan Bersenjata Newspaper West Java edition consequently changed its name to Harian Umum Pikiran Rakjat and was operated under the editor-in-chief Sakti Alamsyah.

Keywords: Sakti Alamsyah Siregar, politics, Pikiran Rakjat Newspaper.

A. PENDAHULUAN

Pers menjadi bagian penting dalam perjalanan sebuah bangsa. Sejak awal masa kolonial Belanda, pers telah memberi warna tersendiri kepada bangsa Indonesia, bahkan pada masa pergerakan pers digunakan sebagai sarana untuk menentang terhadap penguasa kolonial dan menyuarakan cita-cita Indonesia merdeka. Demikian pula di masa revolusi fisik, pers telah menjadi sebuah alat perjuangan yang demikian besar pengaruhnya, sebab melalui pers semua informasi dapat disalurkan kepada khalayak ramai.

Pada masa demokrasi terpimpin, Pemerintah dan tentara memiliki kecenderungan untuk mengendalikan pers. Pernah muncul kebijakan PEPERDA di Jakarta Raya, kemudian disusul oleh PEPERTI (Penguasa Perang Tertinggi) yang diberlakukan di semua wilayah Indonesia pada 1959. Periode inilah awal dari sebuah periode yang dikenal sebagai “pers terpimpin”, mengikuti sistem politik demokrasi terpimpin yang diberlakukan oleh Presiden Soekarno melalui dekritnya pada 5 Juli 1959. Dapat dikatakan bahwa pada masa itu tidak ada lagi kebebasan untuk mengkritik penguasa (dalam hal ini presiden, pejabat negara dan tentara). Peraturan demi peraturan untuk mengendalikan pers terus diberlakukan pada tahun-tahun berikutnya. Pada 1960, misalnya, pemerintah mengeluarkan peraturan baru agar pers mengajukan permohonan izin penerbitannya, dengan menandatangani “19 Pernyataan” untuk setia, mendukung, membela, taat, patuh, membantu, menjadi alat, tidak memuat berita sensasional dan menghina pejabat negara.

Masing-masing lembaga pers memberitakan dan memberikan tanggapan, baik opini maupun kritik, kepada setiap kasus yang dinilai penting menurut kepentingan para pimpinan redaksinya. Kritik pers terhadap penyalahgunaan kekuasaan misalnya ditunjukkan oleh *Merdeka* di Jakarta pada tahun 1952. Surat kabar pimpinan B.M. Diah itu menuduh

menteri perekonomian, Dr. Sumitro Djojohadikusumo, pada masa Kabinet Sukiman melakukan penjualan besi tua bekas peninggalan Perang Dunia II di daerah Morotai, Maluku, tanpa pertanggungjawaban yang jelas. Gambar karikatur *Merdeka* yang berjudul “Harta Karun Morotai” dinilai menghina dan merugikan nama baik Dr. Sumitro (Sjahril & Sjureich, 1971: 126). Karenanya Sumitro menggugat ke Pengadilan Negeri di Jakarta dan mengejek surat kabar *Merdeka* sebagai “pers kuning” (*yellow paper*), dalam artian warna berita dan opini yang disajikannya lebih bersifat sensasional, murahan dan tidak objektif.¹ Mendapat ejekan seperti itu B.M. Diah balik menggugat karena surat kabar *Merdeka* menurutnya adalah pers yang kredibel dan dihormati sejak zaman revolusi Indonesia. Betapapun akhir dari kasus ini tidak jelas sampai dengan terjadi pergantian kabinet, namun masalah hubungan antara pers dengan pemerintah masih dapat dilakukan melalui jalur hukum dan peraturan yang disepakati bersama.

Jatuhnya Kabinet Sukiman (26 April 1951 – 23 Februari 1952) dalam banyak segi juga karena sorotan dan kritikan pers (Feith, 1962: 200-206). Dalam hal ini peranan surat kabar seperti *Indonesia Raya* (pimpinan Mochtar Lubis), *Harian Abadi* (pimpinan Suardi Tasrif) dan *Pedoman* (pimpinan Rosihan Anwar) tidak bisa diabaikan. Kabinet Sukiman jatuh karena salah satunya kebijakan Menteri Luar Negeri Mr. Subardjo Djojoadisuryo yang melakukan penandatanganan MSA berupa bantuan ekonomi dan militer dari Amerika Serikat (Gardner, 1999: 210-220). Kebijakan

¹ Menurut Soebagijo I.N. (1977:96-97), istilah *yellow paper* adalah [...] means a highly sensational kind of newspaper writing; suatu jenis penulisan jurnalistik yang terlampau amat sensasional. Para pembaca pers di Indonesia umumnya menyebut sebagai “koran got” atau “koran comberan”, dalam artian tidak berguna dan menjijikkan.

tersebut dinilai oleh pers sebagai penyimpangan dari haluan politik luar negeri RI yang bersifat bebas-aktif, di mana dasar-dasar pemikiran dan kebijakannya telah diterapkan oleh Mohamad Hatta pada masa revolusi Indonesia (Hatta, 1988). Ketika masalah ini ramai disorot oleh pers dan akan menjadi pembicaraan umum di parlemen, Kabinet Sukiman memilih mundur. Dalam hal ini surat kabar *Pedoman* menurunkan berita utama dalam rangka menyambut kejatuhan Kabinet Sukiman tersebut, dengan judul “Kemenangan bagi Pers”.

Pada 1965 dan 1966 adalah periode kritis bagi bangsa Indonesia. Konfrontasi terhadap negara baru Malaysia yang dimulai sejak 1963, belum juga berakhir. Kehidupan ekonomi semakin suram. Masalah inflasi merupakan salah satu kesulitan besar yang tidak pernah dapat diselesaikan oleh Presiden Soekarno (Nasution, 1983: 1). Pada 23 Februari 1965 pemerintah membredel seluruh pers BPS. Sebulan kemudian, pada 25 Maret 1965, melalui Departemen Penerangan, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa semua surat kabar wajib berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa tertentu.

Peraturan tersebut mengakibatkan wajah pers nasional menjadi semakin bermuatan ideologis. Beberapa media massa menjadi corong parpol dan ormas. Di antaranya adalah: *Suluh Indonesia* menjadi surat kabar corong PNI, yang mempunyai delapan afiliasi di beberapa kota; *Duta Masyarakat* menjadi corong NU (Nakhdatul Ulama) dengan tujuh afiliasi; *Harian Rakjat* corong PKI dengan 14 afiliasi; *Api Pantjasila* corong IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dengan tiga afiliasi. Di tengah hiruk-pikuk slogan “Politik adalah Panglima”, setelah Barisan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dibubarkan, surat kabar yang sebelumnya dicabut izin terbitnya, yakni *Berita Indonesia*, telah dialihnamakan menjadi *Berita Yudha*, media massa yang dikelola ABRI sebagai propaganda guna menahan

media-media *underbow* PKI. Yang menjadi pemimpin umum *Berita Yudha* adalah Brigjen Ibnusubroto, sebagai pemimpin redaksi ditunjuk Brigjen Nawawi Alif. Selain *Berita Yudha*, ABRI pun menerbitkan surat kabar lain bernama *Angkatan Bersendjata* dengan pimpinan Brigjen. R.H. Sugandhi dan Letkol. Yusuf Sirath. Kedua media ini berkantor di Jakarta.



Gambar 1. Gedung HU Pikiran Rakyat
Sumber: Website info Pikiran Rakyat, 2012.

Di lain pihak sejak dikeluarkannya peraturan 25 Maret 1965, pemilik *Pikiran Rakjat* mengambil “langkah aman” dengan menerbitkan koran *Mercusuar* yang berafiliasi dengan Muhammadiyah. Sementara itu, wartawan dan pegawai *Pikiran Rakjat* yang tidak berafiliasi kepada parpol atau ormas tertentu, termasuk Sakti Alamsyah sang pemimpin redaksi, otomatis “menganggur”. Para wartawan yang “menganggur” tersebut tetap “berkantor” di Jl. Asia-Afrika 133 Bandung seraya terus mencari peluang menerbitkan surat kabar yang dinilai “independen”. Warta Harian *Pikiran Rakjat* sendiri otomatis berhenti cetak (website info Pikiran Rakyat, 2012).

Sambil tetap berusaha, banyak di antara bekas wartawan *Pikiran Rakjat* menulis di beberapa surat kabar dan majalah, baik yang terbit di Bandung maupun di Jakarta. Ada pula yang mengarang buku dan membuat komik. Dengan kondisi tersebut, kehidupan para wartawan, terutama yang sudah berkeluarga terombang-ambing oleh ketidakpastian, sementara harga kebutuhan

pokok melambung tinggi. Untuk itu, para wartawan senior *Pikiran Rakjat* melakukan kontak dengan para perwira Kodam VI/Siliwangi. Sementara itu, para wartawan muda sudah mulai bertugas di lapangan dan menyalurkan hasil karyanya lewat dua media massa yang diterbitkan Kodam VI/Siliwangi, yakni *Harapan Rakjat* dan *Berita Yudha*. Mantan wartawan *Pikiran Rakjat* yang jumlahnya 18 orang memperoleh dukungan pula dari sejumlah karyawan pers dari penerbitan yang sama. Dengan begitu, jumlahnya bertambah menjadi 29 orang.

Dari kondisi yang dipaparkan di muka, penelitian ini ingin menunjukkan dan menjelaskan lebih jauh tentang proses pemberedelan surat kabar *Pikiran Rakyat* yang terjadi pada 1965. Mejelaskan surat kabar *Pikiran Rakyat* di masa itu dapat turut menggambarkan situasi pers nasional pada masa demokrasi terpimpin.

B. METODE PENELITIAN

Berdasarkan masalah dalam kurun waktu yang dibahas, penelitian ini didasarkan pada kajian literatur. Penelitian ini merupakan penelitian sejarah sehingga metode yang dipergunakan mulai dari pencarian sumber sampai dengan penulisan berpatokkan pada metode sejarah. Setiap ilmu pengetahuan memiliki seperangkat aturan dan petunjuk yang membantu ketepatan hasilnya. Kompleksitas aturan dan petunjuk inilah yang disebut dengan metode atau teknik (Garraghan, 1957:33; Gottschalk, 1985: 40; Lubis, 2014: 1).

Metode sejarah merupakan proses menguji dan menganalisis secara kritis rekaman dan peninggalan masa lampau. Sebagai penelitian sejarah, maka dalam kajian ini digunakanlah metode sejarah. Dalam proses metode sejarah itu, sejarawan membahas apa yang dinamis atau genetis (yang menjadi), apa yang statis (yang ada atau yang terjadi), dan sejarawan berusaha untuk bersikap interpretatif (menerangkan mengapa dan bagaimana peristiwa itu terjadi dan saling berhubungan), serta bersifat deskriptif

(menceritakan apa, bilamana, di mana, dan siapa yang ikut serta didalamnya). Adapun langkah-langkah dalam metode sejarah terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi (Gottschalk, 1985: 39; Lubis, 2014: 4).

Heuristik merupakan tahapan awal yang dilakukan oleh penulis setelah menentukan topik atau masalah penelitian. Heuristik adalah kegiatan mencari sumber-sumber untuk mendapatkan data-data, atau materi sejarah, atau evidensi sejarah (Sjamsuddin, 2007: 86). Pada tahap ini penulis mengumpulkan sumber-sumber yang valid baik dari sumber primer, maupun sumber sekunder. Sumber yang dapat dipergunakan adalah sumber benda, tertulis dan sumber lisan. Untuk penelitian ini, penulis akan lebih banyak menggunakan sumber tertulis yang didapatkan dari perpustakaan-perpustakaan yang menyediakan buku-buku yang sesuai dengan masalah yang peneliti teliti. Dalam hal ini sumber yang berhubungan dengan penelitian mengenai *Pembredelan Surat Kabar Pikiran Rakjat tahun 1965*. Sumber yang dimaksud di antaranya dapat ditemukan di Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Pusat Universitas Padjadjaran, Perpustakaan Riyadlul Jannah di Jatinangor Kabupaten Sumedang, Perpustakaan Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Arsip Koran *Pikiran Rakyat* di PT Balai Iklan Bandung, Perpustakaan Nasional RI dan Arsip Nasional RI di Jakarta.

Selanjutnya tahap kritik, yaitu memilah dan memilah juga menyaring keotentikan sumber-sumber yang telah ditemukan. Pada tahap ini peneliti melakukan pengkajian terhadap sumber-sumber yang didapat untuk menentukan kebenaran sumber. Pada tahap ini, peneliti melakukan kritik ekstern dan internal. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui sejauh mana otentisitas dari sumber yang diperoleh. Selanjutnya ketika peneliti melakukan kritik sumber yang menjadi

bahan literatur dalam beberapa kajian yang sudah dituliskan pada buku, peneliti akan melihat sejauh mana kompetensi dari penulis buku sehingga isinya dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Lubis (2008: 30), kritik internal bertugas menjawab pertanyaan “apakah kesaksian yang diberikan oleh sumber itu kredibel atau dapat dipercaya? ”. Sejarawan harus memutuskan apakah kesaksian atau data yang diperoleh dari berbagai sumber itu dapat diandalkan atau tidak. Kritik yang dilakukan oleh peneliti ialah dengan cara melihat isi buku kemudian membandingkan dengan buku-buku yang lain. Jika terdapat perbedaan isi dalam sebuah buku, maka peneliti melihat buku dari buku lain yang menggunakan referensi-referensi yang dapat diandalkan.

Tahap Interpretasi adalah tahap memaknai atau memberikan penafsiran terhadap fakta-fakta yang diperoleh dengan cara menghubungkan satu sama lainnya. Tahap ini dilakukan untuk memperoleh fakta sejarah mengenai hal tertentu. Lalu melakukan *koraborasi* suatu data dari suatu sumber sejarah dengan sumber lain (dua atau lebih). Menurut Lubis (2008: 15) interpretasi yaitu tahapan atau kegiatan menafsirkan fakta-fakta serta menetapkan makna dan saling hubungan dari fakta-fakta yang diperoleh.

Terakhir adalah tahap Historiografi. Dalam bahasa Inggris historiografi didefinisikan sebagai pengkajian tentang penulisan sejarah (Lubis, 2008: 9). Sedangkan menurut Gottschalk (1985) historiografi diartikan sebagai rekonstruksi imajinatif daripada masa lampau berdasarkan data yang diperoleh dengan menempuh proses. Dalam melakukan penulisan ini, ada beberapa hal yang penting yang perlu diperhatikan oleh sejarawan yaitu: seleksi, imajinasi, dan kronologi. Historiografi merupakan langkah terakhir dalam prosedur penelitian sejarah. Pada tahapan ini penulis menyajikan hasil temuannya pada tiga tahap sebelumnya dengan cara menyusun dalam bentuk tulisan dengan jelas dan gaya

bahasa yang sederhana, juga menggunakan tata bahasa penelitian yang baik dan benar. Tulisan tersebut dituangkan dalam bentuk Jurnal dengan judul “Pembredelan Surat Kabar Pikiran Rakjat tahun 1965”.

C. HASIL DAN BAHASAN

1. Perkembangan Kebebasan Pers di Indonesia pada 1960-an

Akibat kegagalan Konstituante menyusun undang-undang dasar baru, Presiden Soekarno kemudian mengeluarkan Dekrit Presiden 1959. Setelah itu Indonesia memasuki era baru, yaitu era demokrasi terpimpin. Pada masa itu media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi massa revolusioner di seluruh Indonesia. Rakyat harus didorong untuk memiliki keyakinan yang teguh tentang sosialisme agar dukungan bagi kelangsung revolusi dan peranannya dalam pembangunan nasional dapat terwujud. Pada masa ini, pers nasional berada di bawah system yang otoriter. Pers dijadikan sebagai corong penguasa yang harus mendukung kedudukan presiden dan mendoktrin manipol. Pers berfungsi sebagai alat penggerak aksi massa dalam memberikan informasi dan mendorong masyarakat agar bersedia mendukung pelaksanaan manipol dan setiap kebijakan pemerintah (Taufik, 1977: 114).

Penguasa melakukan rekayasa terhadap pers melalui sistem regulasi represif. Dalam upaya mengkonsolidasi kekuasaannya, Soekarno dengan ketat mengontrol pers dan berusaha membuat pers menjadi jinak dan penurut. Pada tanggal 12 Oktober 1960, dalam kapasitasnya sebagai Penguasa Perang Tertinggi (Peperti), Soekarno mengeluarkan dekrit bahwa setiap penerbitan pers harus mendaftarkan diri terlebih dahulu untuk mendapatkan SIT (Surat Ijin Terbit) (Taufik, 1977: 105). Agar ijin tersebut diperoleh, pers harus memenuhi persyaratan tertentu seperti loyal kepada manifesto politik Soekarno, serta turut berjuang menentang imperialisme, kolonialisme, liberalisme,

federalisme, dan separatisme. Para penerbit dan pemimpin redaksi diharuskan menandatangani dokumen berisi 19 pasal tentang janji-janji pemenuhan kewajiban untuk setia pada program manipol, pemerintah dan Soekarno sendiri. Tujuannya ialah menjadikan pers sebagai alat pendukung, pembela, dan penyebar manifesto politik Soekarno (Taufik, 1977:106).

Akibat kondisi ini, pers di Indonesia merasa berada dalam pengepungan manipol Soekarno. Wartawan Indonesia ketika itu menamakan sistem pers demokrasi dipimpin sebagai pers manipol. Setelah harian *Indonesia Raya* dilarang terbit pada 1961, Mochtar Lubis sebagai editor dipenjarakan di Madiun bersama PM Sutan Sjahrir, Mohammad Roem, Anak Agung Gde Agung, Sultan Hamid, dan Soebadio Sastrosatomo. Semua tahanan tersebut dinilai sebagai oposan oleh Presiden Soekarno. Soekarno kemudian menempatkan percetakan swasta di bawah pengawasan pemerintah berdasarkan Peraturan Administrasi Militer Tertinggi No.2/1961. Pada tanggal 15 Mei 1963, Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden tentang pemberian wewenang kepada menteri penerangan untuk menangani pedoman pers. Pada tanggal 12 September 1962 kantor berita *Antara* dinasionalisasikan dengan Dekrit Presiden No.307/ 1962 (Taufik, 1977: 106).

Kantor berita *Antara* selanjutnya berada dalam pengaruh kaum komunis, seiring dengan semakin meningkatnya pengaruh PKI di pemerintahan. Kondisi ini kemudian sampai pada taraf kritis karena lebih dari separuh berita yang diterbitkan bersifat pro-komunis. Surat kabar milik PKI, yaitu *Harian Rakyat*, tirasnya terus meningkat menjadi 75.000 eksemplar pada tahun 1964 dan terus meningkat lagi menjadi 85.000 eksemplar pada tahun 1965. Hal ini kemudian mendorong para wartawan dari 10 surat kabar yang tergabung dalam BPS (Barisan Pendukung Soekarno) gigih menentang PKI. Pertentangan ini terlihat

jelas pada isi berita *Harian Rakyat* milik PKI melawan *Harian Merdeka* milik B.M. Diah. Namun demikian, Soekarno ternyata lebih memihak PKI karena menganggap PKI lebih dapat diandalkan sebagai landasan kekuasaan daripada kaum nasionalis. Sehingga pada bulan Februari dan Maret tahun 1965, tujuh belas surat kabar yang tergabung dalam BPS dilarang terbit. Tidak menyerah dengan kondisi tersebut, pada 1965 Angkatan Bersenjata menerbitkan surat kabar *Berita Yudha*. Pada bulan Maret 1965, Menteri Penerangan mengeluarkan Peraturan Nomor 29 yang menegaskan bahwa surat kabar harus berasal dari sembilan partai politik yang ada. Aturan tersebut merupakan upaya Soekarno untuk mengintegrasikan surat kabar agar partai-partai politiklah yang pertama mengontrol surat kabar (website Pikiran Rakyat, 2017).

Pada masa ini pula muncul saluran televisi Indonesia yang pertama, yaitu TVRI yang awalnya digunakan untuk menyiarkan tayangan Asian Games IV. Setelah menayangkan acara tersebut, TVRI belum dapat meneruskan siarannya karena tidak adanya studio khusus dan keterlambatan persediaan film. Lalu, atas desakan Yayasan Gelora Bung Karno, pemerintah membangun studio darurat sebagai studio operasional TVRI yang memungkinkan siaran TVRI selama satu jam setiap harinya, hingga akhirnya jam siaran TVRI terus bertambah dan pada 12 November 1962, TVRI mulai mengudara secara reguler setiap hari (Sudibyo, 2004: 279).

TVRI berperan sentral dalam proses komunikasi politik pemerintah. TVRI adalah medium untuk mempromosikan program pemerintah, memperteguh konsensus nasional tentang budaya nasional, pembangunan, tertib hukum, dan menjaga kemurnian identitas bangsa. TVRI lebih banyak diperlakukan sebagai alat propaganda pemerintah ke dalam dan ke luar negeri, serta sebagai medium konsolidasi kekuasaan dan monopoli informasi oleh pemegang kekuasaan.

Dapat dikatakan bahwa pers, radio, dan film harus digerakkan sebagai satu kesatuan terpadu secara terpimpin berencana dan terus menerus ke arah kesadaran mengenai sosialisme Indonesia dan Pancasila² (Sudiby, 2004:279).

Pada masa itu pemerintah pernah melarang penerbitan surat-surat kabar yang tidak menggunakan huruf latin. Hal ini berarti melarang penerbitan pers yang menggunakan aksara Cina. Antara 1960 hingga 1965, peredaran pers di Indonesia tidak menunjukkan perkembangan yang stabil sebagai pencerminan keadaan secara umum. Jumlah surat kabar dan oplah pada 1960 hampir tidak berbeda dengan tahun sebelumnya. Pada 1959, oplah 94 surat kabar harian mencapai 1.036.500 lembar sedangkan oplah 273 jenis penerbitan lainnya berjumlah sedikit di atas tiga juta lembar. Pada 1960 jumlah surat kabar harian mencapai 97 dengan oplah sebanyak 1.0905000, sedangkan jumlah

berbagai jenis penerbitan lainnya adalah 230 penerbitan dengan oplah sebanyak 3.350.000 lembar per terbit (Soebagiyo, 2004:278).

Seiring situasi politik di zaman demokrasi terpimpin makin memanas, dunia pers nasional pun terkena imbasnya, tak terkecuali *Warta Harian Pikiran Rakyat*. Berawal dari pidato Presiden pada 17 Agustus 1959 yang diberi nama Manifesto Politik (Manipol), pelbagai sektor kehidupan nasional harus mengikuti kebijakan pemerintah. Pers nasional pun diarahkan untuk kepentingan Demokrasi serta Manipol. Sebagai landasan hukum, dikeluarkanlah Lampiran A Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 yang menetapkan bahwa media massa harus diarahkan untuk mendorong aksi revolusioner di seluruh Indonesia, di mana semua media massa seperti pers, radio, film, harus digerakkan sebagai kesatuan yang terpadu secara terpimpin. Untuk mewujudkan pers yang progresif-revolusioner, pemerintah berjanji akan membantu dalam pengadaan fasilitas, latihan, dan kertas koran (website *Pikiran Rakyat*, 2019).

Rupanya campur tangan pemerintah tidak berhenti sampai sana. Presiden Sukarno sebagai Penguasa Perang Tertinggi pada 12 Oktober 1960 mengeluarkan peraturan yang mewajibkan setiap penerbit mendaftarkan diri untuk mendapatkan Surat Izin Terbit (SIT). SIT tersebut bisa diperoleh jika pers memenuhi persyaratan. Antara lain loyal terhadap Manipol-Usdek, bersedia menaati Peraturan Penguasa Perang Tertinggi No. 10 tahun 1960, serta bersedia menandatangani perjanjian pemenuhan kewajiban yang berisi 19 pasal. Pertentangan di panggung politik nasional antara pendukung Manipol-Usdek versus yang kontra terhadapnya makin meruncing. Salah satunya adalah pembubaran Barisan Pendukung Sukarnoisme (BPS) di seluruh Indonesia pada 17 Desember 1964 oleh Presiden Sukarno sendiri.

² Maka kemudian ditentukan langkah-langkah untuk menciptakan pers Manipol menuju tercapainya pers sosialis ialah,

1. Mendirikan kantor berita nasional yang kuat dan lengkap
2. Membantu organisasi penerbitan pers menyelenggarakan seminar-seminar pers
3. Mengadakan pendidikan dan latihan bagi para pelaksana pers
4. Mengadakan pendidikan wartawan
5. Mendirikan pusat pers
6. Membantu penyediaan kertas Koran
7. Menyelenggarakan kunjungan kerja oleh wartawan ke proyek-proyek pembangunan
8. Menyiapkan undang-undang pers yang mencakup antara lain: penjabaran fungsi-fungsi pers dalam rangka melaksanakan Manipol demi kelangsungan revolusi dan pembangunan semesta berencana; penjabaran hak-hak dan kewajiban-kewajiban pers; serta penjabaran kebebasan pers, terutama peredarannya di kalangan pekerja
9. Membangun pabrik-pabrik kertas agar impor kertas Koran tidak diperlukan lagi.
10. Meningkatkan kesejahteraan pekerja-pekerja pers (Soebagiyo, 2004:78).

BPS didirikan oleh Adam Malik, B.M. Diah (*Harian Merdeka*), dan Sumantoro (*Berita Indonesia*) guna membendung pengaruh PKI (Partai Komunis Indonesia), yang kemudian mendapatkan perlawanan dari pihak komunis yang menuduh BPS sebagai “kaum reaksioner” dan “menentang arus sejarah dan gerakan revolusioner rakyat Indonesia”. Presiden Sukarno malah menuduh BPS sebagai agen CIA (badan intelijen AS) dan mendapat dana jutaan dolar dari Amerika Serikat. Sementara keputusan tersebut disambut gembira oleh PKI, banyak wartawan simpatisan BPS anggota PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) yang telah dikuasai golongan komunis telah dipecat. Menyusul pemecatan tersebut, tanggal 23 Februari 1965 pemerintah membredel seluruh pers BPS. Sebulan kemudian, tanggal 25 Maret 1965, melalui Departemen Penerangan, pemerintah mengeluarkan peraturan bahwa semua surat kabar wajib berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa tertentu (website Pikiran Rakyat, 2017).

Peraturan tersebut mengakibatkan wajah pers nasional makin bermuatan ideologis. Beberapa media massa menjadi corong parpol dan ormas. Media yang dimaksud di antaranya adalah *Suluh Indonesia* yang menjadi surat kabar corong PNI, yang mempunyai delapan afiliasi di beberapa kota; *Duta Masyarakat* menjadi corong NU (Nakhdatul Ulama) dengan tujuh afiliasi; *Harian Rakjat* corong PKI dengan 14 afiliasi; *Api Pantjasila* corong IPKI (Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia) dengan tiga afiliasi (website Pikiran Rakyat, 2017).

2. Keadaan Surat kabar *Pikiran Rakjat* sebelum Berlakunya Undang-undang Pers Tahun 1965

Maraknya kehidupan politik Indonesia setelah tahun 1950-an, terutama pada masa demokrasi liberal, terlihat jelas dari wajah pers yang ada pada saat itu. Kondisi pers Indonesia pada masa itu sangat sejalan dengan anggapan yang menyatakan bahwa

“suatu bentuk pers selamanya sesuai dengan struktur politik dan sosial setempat di mana pers tadi bergerak” (Taufik, 1977: 80). Kedekatan pers dengan kehidupan politik seperti yang tergambar pada masa demokrasi liberal, secara khusus dapat dikatakan sebagai sebuah cerminan sikap yang ingin ditunjukkan oleh sebuah surat kabar yang pada dasarnya mengandung dua unsur, yaitu penyajian berita (*news*) yang bersifat faktual dan pandangan-pandangan (*views*) yang bersifat opini (Suwirta, 2000: 1). Lebih jauh mengenai sikap, pandangan, dan pendapat yang ingin diungkapkan oleh sebuah surat kabar biasanya terlihat baik dari tajuk rencana, catatan pojok, karikatur maupun sebuah kepala berita. Sebuah harian lokal yang terbit dan berkembang ketika kondisi politik Indonesia diwarnai oleh adu kekuatan antara partai-partai politik pada masa demokrasi liberal yaitu *Harian Umum Pikiran Rakjat* di Bandung. *Pikiran Rakjat* merupakan salah satu surat kabar yang lahir akibat iklim kebebasan pers pada masa demokrasi liberal. *Pikiran Rakjat* tidak memihak salah satu partai yang ada dan tidak memiliki hubungan yang formal dengan partai politik manapun.

Di tengah hiruk-pikuk slogan “politik adalah panglima”, setelah Barisan Pendukung Sukarnoisme (BPS) dibubarkan, sebagai surat kabar yang terbit di Bandung, *Pikiran Rakjat* terlihat sangat responsif terhadap penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung pada 1955. Selain itu, keberpihakan *Pikiran Rakjat* terhadap acara itu terlihat dari tajuk-tajuknya yang berisi tentang dukungan dan ajakan untuk mensukseskan acara besar ini. Meskipun demikian, *Pikiran Rakjat* memiliki sikap yang cukup keras terhadap anasir-anasir luar yang akan mengganggu jalannya konferensi, terutama pengaruh dari negara-negara yang tergabung ke dalam blok barat dan blok timur (Suwirta, 2008).

Sementara itu sebagai sebuah surat kabar yang ingin menempatkan diri

sebagai milik warga Jawa Barat, tentu *Pikiran Rakjat* akan membela hak-hak warga Jawa Barat, salah satunya hak untuk merasakan keamanan. Hal itu diperlihatkan oleh *Pikiran Rakjat* dengan memihak sepenuhnya usaha pemerintah RI, khususnya tentara Siliwangi di Jawa Barat dalam menumpas gerakan DI/TII di Jawa Barat dan mengecam aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh golongan DI/TII tersebut. Dukungan itu semakin terlihat saat menjelang dan setelah tertangkapnya pimpinan DI/TII Jawa Barat. *Pikiran Rakjat* bertindak sebagai juru penerang bagi masyarakat maupun bagi anggota gerakan DI/TII yang masih belum menyerahkan diri. Masalah lain yang menjadi sorotan *Pikiran Rakjat* adalah penyelesaian masalah Irian Barat. Masalah ini sejak berakhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB) pada 1949 selalu menjadi sorotan surat kabar-surat kabar Indonesia, termasuk *Pikiran Rakjat* (Iskantini, 2002).

Tahun 1949 telah diputuskan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) bahwa masalah Irian Barat akan diselesaikan setahun setelah penyelenggaraan KMB, namun tampaknya pihak Belanda kurang menganggap serius apa yang telah disepakatinya bersama Indonesia itu. Terbukti selang satu tahun Belanda belum juga menampakkan tekad ingin menyelesaikan masalah ini. Tentu saja hal itu mengundang “kegusaran” di pihak Indonesia. Pada awalnya *Pikiran Rakjat* berpendapat bahwa masalah Irian Barat adalah sebuah jalan untuk mengalihkan perhatian masyarakat Indonesia yang pada saat itu terancam disintegrasi karena pertikaian masalah politik dan etnis, sehingga potensi konflik yang terpendam itu akan dapat disalurkan melalui perjuangan merebut Irian Barat. Akan tetapi pada perkembangan selanjutnya, seiring dengan kondisi politik Indonesia yang berubah, *Pikiran Rakjat* pada akhirnya memiliki pandangan yang senada dengan pemerintah RI dan mendukung kebijakan pemerintah yang memilih

menyelesaikan Irian Barat dengan cara militer (Iskantini, 2002).

Sebagai sebuah surat kabar yang terbit di daerah, keberadaan *Pikiran Rakjat* cukup menonjol dibandingkan dengan koran-koran lain yang terbit di Bandung. Menonjolnya *Pikiran Rakjat* bisa dilihat dari segi oplah. Menurut Iskantini (2002), sebagaimana ia mengutip pendapat Atang Ruswita dan Soeharmono Tjitrosoewarno, oplah *Pikiran Rakjat* berkisar antara 15.000 sampai 17.000-an. Meski dibandingkan dengan surat kabar lain yang terbit di Jakarta oplah *Pikiran Rakjat* masih kalah, namun untuk sebuah koran daerah tiras itu sudah cukup membuat *Pikiran Rakjat* lebih unggul dibanding dengan surat-surat kabar lain di Jawa Barat.

Sebagai sebuah koran yang terbit di Jawa Barat, sudah tentu *Pikiran Rakjat* berusaha mendekati diri dengan masyarakat pembaca yang mayoritas orang Sunda. Hal itu diperlihatkan oleh *Pikiran Rakjat* yang pada tahun 1958 mulai memunculkan tokoh karikatur yang menjadi prototipe orang Sunda dengan nama “Mang Ohle”. Sosok “Mang Ohle” itu ditampilkan sebagai wakil dari rakyat kebanyakan. Menurut Iskantini (2002), sebagaimana ia mengutip pendapat Soeharmono Tjitrosoewarno, filosofi yang terkandung dari hadirnya tokoh “Mang Ohle” ini adalah agar *Pikiran Rakjat* selalu dekat dengan pembacanya, dalam hal ini masyarakat Sunda.

3. Latar Belakang Penerapan Undang-undang Pers Tahun 1965

Masalah utama dalam masa Demokrasi Terpimpin ialah keterbelakangan dalam sektor pembangunan percetakan pers, di mana sejak 1952 hingga 1964 pemerintah hanya mendirikan beberapa perusahaan percetakan. Kondisi ini terjadi karena kebanyakan mesin cetak yang ada ialah peninggalan Belanda dan juga Jepang (Soebagijo, 1977: 78). Di sisi lain, pada masa demokrasi terpimpin ini pemerintah Soekarno mulai cenderung untuk

bersahabat dengan negara-negara Komunis atau negara-negara blok Timur. Akibatnya Partai Komunis Indonesia (PKI) mengalami masa kedigdayaan karena senantiasa disokong oleh Pemerintah. Organ-organ Pers PKI dan pendukungnya seperti *Harian Rakyat*, *Bintang Timur*, *Warta Bhakti* di Jakarta, kemudian ditambah dengan *Gelora Indonesia* dan *Kebudayaan Baru* yang juga terbit di Ibukota. Belum terhitung sejumlah mingguan *Trompet Masyarakat* di Surabaya; *Harian Harapan* dan *Gotong Royong* di Medan; dan di berbagai kota lainnya dengan sendirinya ikut memanaskan dan mematangkan situasi revolusioner (Said, 1998: 89).

Taktik ofensif PKI yang radikal semakin membuatnya dekat dengan Presiden Soekarno seperti dalam masalah Irian Barat serta konfrontasi dengan federasi Malaysia. Selain itu, ketegangan dengan Amerika Serikat telah dimanfaatkan benar oleh PKI untuk mendapatkan dukungan umum (Taufik, 1977: 105). Selain itu di desa-desa anggota PKI melancarkan aksi agitasi dan propaganda memerangi tujuh setan desa, akibatnya di beberapa tempat sering terjadi kerusuhan di antara rakyat dan ABRI serta orang-orang yang terhasut oleh PKI (Taufik, 1977: 105).

Taktik PKI ofensif PKI juga mendapat perlawanan dari kalangan Pers Anti PKI. Perlawanan terhadap PKI tersebut berkisar pada lahirnya Manifesto Kebudayaan, aksi boikot film-film barat, dan masalah penyederhanaan Partai. Pada waktu itu juga terjadi pula polemik sengit antara *Berita Indonesia* dan *Merdeka* serta koran-koran anti-PKI lainnya dengan *Harian Rakyat* dan penyokongnya bermula dari pandangan presiden yang menyatakan tidak puas dengan sistem kepartaian yang ada dan menginginkan restrukturisasi. Khawatir dengan hal itu PKI menyerang pihak-pihak yang menyatakan setuju dengan usulan itu (Semma, 2008: 109).

Pertentangan dalam jajaran pers Indonesia meluaskan sorotan dan

kesadaran masyarakat terhadap ofensif PKI di berbagai bidang, termasuk pers. Penyusupan PKI dan penyokongnya di organisasi pers seperti PWI, SPS, Antara dan lain-lain menimbulkan kecemasan di kalangan luas. Setelah Pemerintah menutup sejumlah Koran anti-PKI, PKI justru memperbesar jaringan penerangan dan propagandanya dengan menerbitkan koran-koran baru (Semma, 2008: 109).

Sementara itu, untuk membendung taktik ofensif PKI, pada 1 September 1964 didirikan Badan Pendukung Sukarnoisme (BPS) di lingkungan surat kabar, radio dan televisi. Anggota-anggota BPS di antaranya adalah Hismawara Darmawati, Joenoes Lubis, Asnawi Idris. Pemerintah di waktu itu, telah mendapat tekanan dari orang-orang komunis yang duduk dalam pemerintahan, sehingga memutuskan pada bulan Februari 1965 untuk melarang semua aktifitas dan mencabut izin terbit Koran-koran penyokong BPS. Namun demikian, golongan-golongan anti BPS tetap belum puas mereka menuntut diadilinya gembong-gembong BPS karena merupakan gembong-gembong CIA (Said, 1998: 80).

Adapun lawan politik BPS adalah Koran-koran PKI/PNI seperti *Harian Rakyat*, *Bintang Timur*, *Suluh Indonesia*, dll. Sepanjang tahun 1964, terjadi saling menyerang di dalam pers nasional, misalnya antara *Merdeka* yang mengecam *Front Nasional* dan *Suluh Indonesia* yang mendukung *Front Nasional* (Said, 1998:79). Selain itu, muncul juga fitnahan bahwa anggota BPS adalah agen CIA. Akibatnya BPS kemudian dibubarkan oleh Presiden Soekarno pada 17 Desember 1964. Pembubaran tersebut menyebabkan para wartawan yang masuk ke dalam BPS dipecat dari keanggotaan mereka dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), kemudian surat-surat kabar yang bergabung ke dalam BPS dibekukan (Said, 1998: 80).

Wartawan-wartawan anggota BPS diproses di kejaksaan seperti Sumantoro, Joenoes Lubis, Sajuti Melik, Asnawi Idris,

Zein Effendi. Namun demikian keadaan berubah drastis setelah terjadi peristiwa G30/S PKI. Kondisi yang terjadi kemudian justru mulai berbalik. Orang-orang PKI mulai banyak yang kemudian dibunuh atau dipenjara. Sejak saat itu mulai masuk kepada masa baru, yaitu masa orde baru.

Mengenai izin terbit surat kabar, pada 1960 lebih terperinci lagi syarat-syaratnya. Pada permintaan izin terbit harus menyetujui dan menandatangani kesanggupan 19 pasal. Kesembilan belas pasal itu mencerminkan kebijaksanaan pemerintah waktu itu. Peraturan Peperti No. 10/1960 ini bersama dengan Penpers No.6/1963 bisa disebut sebagai tulang punggung kebijaksanaan pemerintah di bidang pers sesudah tahun 1959 (Tim LSPP, 2005: 183).

Pada Mei 1965, pemerintah mengeluarkan kebijakan baru tentang pers. Sejalan dengan politik Nasakom, pers harus menginduk kepada kekuatan-kekuatan sosial-politik yang diakui keberadaannya oleh pemerintah. Pers yang tidak memiliki “gandulan”, patronase, atau afiliasi dianggap sebagai institusi yang individualis, liberal, mengambang dan tidak revolusioner. Dengan kebijakan ini, pers komunis mendapatkan keuntungan yang besar (Sjahril & Sjureich, 1971: 130). Sebab dari 80 surat kabar yang terbit pada masa itu, PKI yang pers resminya bernama *Harian Rakjat* memiliki 14 surat kabar yang berafiliasi dengannya. Wartawan kawakan, Djamaluddin Adinegoro, menyebut fenomena ini sebagai surat-surat kabar yang di-*slagorde*-kan (Sjahril & Sjureich, 1971: 130).

Akibat kebijakan ini pula ada beberapa surat kabar yang ingin tetap mempertahankan independensinya seperti surat kabar *Pikiran Rakjat* di Bandung (1950-1965), harus menghentikan penerbitannya. (Iskantini, 2002: 80). Kebijakan pemerintah untuk mengontrol pers dapat dilakukan dengan berbagai tindakan. Alasan-alasan untuk menindak pers dalam banyak hal tergantung pada selera dan interpretasi pemerintah terhadap

warna berita dan opini yang dinilai merugikan wibawa pemerintah, mengganggu ketenangan, keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keselamatan negara. Pihak pers sendiri sama sekali tidak diberi hak dan kesempatan untuk membela diri di pengadilan. Tindakan pemerintah terhadap pers tersebut dapat berupa: peringatan, pemanggilan, penahanan, interogasi, pemukulan, perusakan, pemenjaraan, denda atau ganti rugi dan pembredelan (Iskantini, 2002: 80).

4. Dampak Berlakunya Undang-undang Pers Bagi Surat Kabar *Pikiran Rakjat*

Pada 25 Maret 1965, pemerintah, melalui Departemen Penerangan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan semua suratkabar mempunyai gandulan atau berafiliasi kepada partai politik atau organisasi massa. *Pikiran Rakjat* yang juga ikut merasakan perjalanan pers Indonesia pada masa demokrasi liberal, merupakan salah satu koran yang tidak berafiliasi dengan partai politik manapun. Hal itu berkaitan dengan prinsip salah seorang pendiri dan pemimpin umumnya, Djamal Ali, yang menurutnya:

“[...] *Pikiran Rakjat* tidak boleh menjadi corong dari golongan manapun. Bagi saya *Pikiran Rakjat* adalah tetap pikiran rakyat dan bukan pikiran partai” (Ali, 1995: 60).

Perjalanan *Pikiran Rakjat* yang terbit tahun 1950 ini akhirnya harus berhenti pada akhir 1965 ketika pemerintah mengeluarkan peraturan yang mengharuskan setiap surat kabar untuk berafiliasi ke surat kabar partai atau pemerintah, dalam hal ini ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia). Namun demikian, antara direksi dan redaksi saat itu tidak ada kesamaan pendapat dan kesepakatan. Pihak direksi yang diwakili oleh Djamal Ali tetap berpegang teguh pada prinsip bahwa *Pikiran Rakjat* harus tetap menjadi surat kabar independen dan

menolak untuk bergabung dengan kekuatan politik manapun (Ali, 1995:60). Akhirnya *Pikiran Rakjat* pun dilarang terbit dan assetnya disita oleh pemerintah Orde Baru karena sampai batas waktu yang ditentukan, pihak *Pikiran Rakjat* belum memberikan keputusan akan bergabung ke mana.

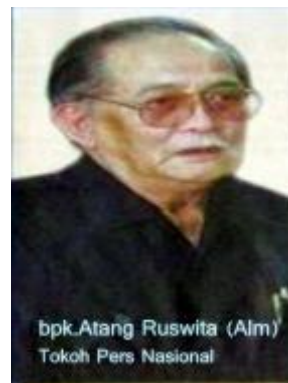


Gambar 2. Sakti Alamsyah Siregar
Sumber: 1.bp.blogspot.com, 2019.

Selanjutnya, pihak redaksi yang diwakili oleh Sakti Alamsyah, Atang Ruswita, dan yang lain-lainnya ditawarkan oleh Panglima Siliwangi, Mayjen Ibrahim Adjie untuk menerbitkan sebuah surat kabar yang berafiliasi dengan surat kabar ABRI yaitu *Angkatan Bersendjata*. Pada tanggal 24 Maret 1966 terbitlah sebuah surat kabar *Harian Angkatan Bersendjata Edisi Jawa Barat*. Sementara itu, Direksi Bandung N.V. sendiri menerbitkan koran lain yang berafiliasi dengan Muhammadiyah, bernama *Mertju Suar*. Yang menarik adalah komentar *Mertju Suar* dalam kaitannya dengan keberadaan dan akhir dari surat kabar *Pikiran Rakjat* tahun 1950/1960-an. Dalam tajuk perdananya, *Mertju Suar* menulis: “*Pikiran Rakjat* terbit karena tuntutan perjuangan, tapi kini mati akibat tuntutan peraturan”.

Mantan wartawan *Pikiran Rakjat* yang jumlahnya 18 orang pada waktu itu mendapat dukungan pula dari sejumlah karyawan pers dari penerbitan yang sama. Sehingga keseluruhan karyawan berjumlah 29 orang. Sejumlah karyawan pers teman lama, diajak untuk bergabung tetapi ada

yang menolak dan ada pula yang menunggu waktu yang baik. Di saat-saat yang sulit itulah, dengan dana pinjaman ke-29 orang itu mulai mendapatkan honor tetap Rp 5 per minggu. Penerbitan mulai berjalan dan semua bekerja keras. Seluruh wartawan muda dikerahkan, bukan saja bertugas sebagai reporter tetapi juga sebagai tenaga pemasaran. Ada di antaranya mulai dititipi 5 (lima) koran tiap pagi dan biasanya tanpa sisa lalu hasilnya disetor ke petugas distribusi.



Gambar 3. Atang Ruswita
Sumber: blog Belajar Bisnis Media, 2012.

Selanjutnya, terjadi peristiwa G30S/PKI tahun 1965, dengan segala implikasinya surat kabar *Pikiran Rakyat* pun terkena imbasnya. Anggapan umum bahwa *Pikiran Rakyat* telah masuk dalam konspirasi kekuatan Orde Lama, cukup dirasakan juga oleh para anggota redaksinya. Dalam salah satu catatan pojoknya pada awal tahun 1966, *Pikiran Rakyat* menyatakan bahwa ketika para mahasiswa Bandung melakukan demonstrasi menentang rezim Orde Lama dan mencuat sebuah teriakan “Ganyang *Pikiran Rakjat*”, sudah cukup membuat para redaktur surat kabar ini gemetar dan kekuatan. Padahal yang dimaksud *Pikiran Rakyat* oleh mahasiswa itu bukan *Pikiran Rakjat*, melainkan Pemuda Rakyat, sebuah organisasi yang berafiliasi dengan PKI (Partai Komunis Indonesia). Nampaknya peristiwa G30S/PKI telah membawa akibat-akibat yang kurang menguntungkan bagi *Pikiran Rakjat*. Surat kabar *Pikiran*

Rakjat yang semula mempunyai motto “Mengajak Pembaca Berfikir Kritis” itu kemudian disita oleh militer, dalam hal ini tentara Siliwangi. Penyitaan ini nampaknya dilakukan karena sikap Asmara Hadi, Pemimpin Redaksi *Pikiran Rakyat* ketika itu, yang terus-menerus menyerang militer sebagai kekuatan utama Orde Baru. Dalam pandangan Djamal Ali, Pimpinan Umum *Pikiran Rakjat*, penyitaan terhadap surat kabar miliknya itu sebagai tindakan yang tidak adil. Namun demikian, Djamal Ali berusaha untuk mendapatkan kembali *Pikiran Rakjat* sebagai asset pribadinya itu, tetapi tidak berhasil. Pada awal tahun 1970-an Djamal Ali kemudian bergabung dengan surat kabar *Suara Karya* milik Golkar (Golongan Karya). Sementara itu Asmara Hadi setelah *Pikiran Rakyat* tidak terbit lagi, seolah hilang dari peredaran elite politik Orde Baru bersama dengan memudarnya kekuatan politik Orde Lama.

Ketika aturan afiliasi politik ini dicabut pada 1967, anggota redaksi sepakat untuk menghidupkan kembali *Pikiran Rakjat* dengan visi dan misi baru sesuai dengan orientasi politik pembangunan Orde Baru. Motto yang diambil oleh *Pikiran Rakjat* pada masa Orde Baru ini adalah: “Dari Rakyat, Oleh Rakyat, Untuk Rakyat”; dan “PR, Beritanya Dapat Dipercaya”. Adam sebagai salah satu perintis Orde Baru, kembali bertemu Sakti Alamsyah. Sementara itu, Mochtar Lubis menerbitkan kembali surat kabar *Indonesia Raya* yang sebelum dibredel sudah mengusung motto ‘Dari Rakyat, Oleh Rakyat dan Untuk Rakyat’. Sakti Alamsyah dengan *Pikiran Rakjat* juga mulai mendapat ‘angin’. Ada peraturan tak tertulis di antara para pelopor dan pendiri utama harian *Pikiran Rakjat* bahwa semua memiliki hak yang sama. Karena itu, ketika status yayasan akan berubah menjadi badan hukum perseroan terbatas, notaris kaget, mengingat pendirinya berjumlah hampir 29 orang sedangkan biasanya pemilik perusahaan semacam itu tidak banyak; paling dua - tiga orang.

D. PENUTUP

Pembredelan pers menimbulkan implikasi memudarnya kebebasan pers, bahkan berpotensi menghilangkan kebebasan pers. Salah satu ciri penting dalam sistem demokratis adalah pers yang bebas dan independen. Pers sering disebut sebagai "pilar keempat" dari sistem yang demokratis. Tanpa pers yang bebas dan independen, suatu negara sulit mengaku sebagai negara demokratis. Ketika kebebasan pers tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam suatu negara, niscaya demokrasi dalam negara tersebut tidaklah akan pernah ada. Sebabnya di dalam negara yang cenderung dominan, pers hanya akan menjadi corong ataupun alat propaganda pemerintah. Bilamana keduanya tidak memiliki kedudukan yang seimbang, maka demokrasi hanyalah sebuah utopia belaka.

Pers Indonesia pada masa demokrasi liberal tergoda dan hanyut dalam dunia politik praktis. Mereka lebih banyak memerankan diri sebagai corong atau terompet partai-partai politik besar. Inilah yang disebut era pers partisipan. Artinya, pers dengan sadar memilih untuk menjadi juru bicara sekaligus berperilaku seperti partai politik yang disukai dan didukungnya. Kebebasan pers, pada masa itu diartikan sebagai bebas untuk memilih salah satu partai politik sebagai induk semang dan buka bebas untuk meliput dan melaporkan apa saja yang harus dan ingin diketahui masyarakat luas.

Antara tahun 1950-1965, negara Indonesia mengalami dua fase perkembangan politik. Pada masa Demokrasi Liberal, peta kekuatan politik tidak terpusat pada satu golongan, bahkan tidak ada kekuatan yang benar-benar mendominasi kancah perpolitikan di Indonesia. Hal itu berdampak pada terbentuknya segmentasi masyarakat Indonesia yang dipengaruhi oleh ideologi tertentu. Sementara itu, pada masa demokrasi terpimpin, kekuatan-kekuatan yang sebelumnya muncul pada akhirnya bermuara pada Soekarno yang menjadi

sosok utama dalam gelanggang politik nasional.

Wajah pers Indonesia antara tahun 1950-1965 pun ikut ditentukan oleh sistem politik yang berkembang. Tahun 1950-1959, kehidupan pers Indonesia benar-benar dipengaruhi oleh alam demokrasi liberal. Meski tidak seluruh surat kabar menyuarakan cita-cita politik partai, namun wajah pers Indonesia saat itu lebih diwarnai oleh munculnya surat kabar-surat kabar yang menjadi kepanjangan tangan partai. Berbeda dengan zaman demokrasi terpimpin di mana wajah pers cenderung seragam menyuarakan kepentingan politik pemerintah, sehingga kalaupun ada surat kabar yang berseberangan dengan pemerintah, maka bagi pers yang bersangkutan sama artinya dengan menggali kubur sendiri.

Satu di antara sekian banyak surat kabar yang hidup pada zaman dan kondisi yang berbeda adalah *Harian Umum Pikiran Rakjat* di Bandung. Meskipun lahir di saat pers mulai mengalami polarisasi pada berbagai golongan, namun *Pikiran Rakjat* adalah sebuah surat kabar yang independen dan tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik tertentu. *Pikiran Rakjat* merupakan salah satu surat kabar yang memiliki sejarah hidup yang unik karena mengalami dua fase perkembangan. Masing-masing fase ini ditandai oleh ciri khas yang berbeda satu sama lain dan dua fase ini dipisahkan oleh suatu momentum khusus yang muncul sebagai akibat jauh dari Peristiwa G30S (Gerakan 30 September) tahun 1965. Momentum itu berupa munculnya aturan pemerintah yang mengharuskan setiap surat kabar berafiliasi dengan partai politik tertentu, ABRI, atau pemerintah.

Sebagai surat kabar yang terbit di Bandung, *Pikiran Rakjat* sangat responsif terhadap penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika yang diadakan di Bandung tahun 1955. Selain itu “keberpihakan” *Pikiran Rakjat* terhadap acara itu terlihat dari tajuk-tajuknya yang berisi tentang

dukungan dan ajakan untuk mensukseskan acara besar ini.

Sementara itu sebagai sebuah surat kabar yang ingin menempatkan diri sebagai milik warga Jawa Barat, *Pikiran Rakjat* akan membela hak-hak warga Jawa Barat, salah satunya hak untuk merasakan keamanan. Hal itu diperlihatkan oleh *Pikiran Rakjat* dengan memihak sepenuhnya usaha pemerintah RI, khususnya tentara Siliwangi di Jawa Barat, dalam menumpas gerakan DI/TII di Jawa Barat dan mengecam aksi-aksi anarkis yang dilakukan oleh golongan DI/TII tersebut. Masalah lain yang menjadi sorotan *Pikiran Rakjat* adalah penyelesaian masalah Irian Barat. Sejak berakhirnya Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, Irian Barat selalu menjadi sorotan surat kabar-surat kabar Indonesia, termasuk *Pikiran Rakjat*. Seiring dengan kondisi politik Indonesia yang berubah, *Pikiran Rakjat* pada akhirnya memiliki pandangan yang senada dengan pemerintah RI dan mendukung kebijakan pemerintah yang memilih menyelesaikan Irian Barat dengan cara militer.

DAFTAR SUMBER

- Ali, D. (1995). *Sekilas Perjalanan Hidup Saya: Seperti yang Diturunkan kepada Cendrawati Suhartono dan Pradjoto*. Jakarta: SPS Pusat.
- Atang Ruswita Dilematika Bisnis Surat Kabar. (2012). Diakses dari <https://belajarbisnismedia.files.wordpress.com/2012/03/atang-ruswita2.jpg>.
- Feith, H. (1962). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca, New York: Cornell University Press.
- Gardner, P. F. (1999). *Lima Puluh Tahun Hubungan Amerika Serikat – Indonesia: Bersama dalam Harapan, Sendirian dalam Kecemasan*. Terjemahan. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Garraghan, G. J. 1957. *A Guide to Historical Method*. New York: Fordham University Press.

- Gedung HU Pikiran Rakyat. (2012). Diakses dari <http://info.pikiran-rakyat.com/sites/default/files/pub/styles/medium/public/image/2012/01/1.jpg?itok=-X0U3CLH>.
- Gottschalk, L. (1957). *Mengerti Sejarah*. Terjemahan Nugroho Notosusanto. Jakarta: Yayasan Penerbit Universitas Indonesia.
- Iskantini, E. (2002). Harian Umum Pikiran Rakyat di Bandung, 1950-1965: Pers Lokal yang Berorientasi Nasional. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 6 (3).
- Lubis, N. H. (2008). *Historiografi Indonesia dan Permasalahannya*. Bandung: CV. Satya Historika.
- _____. (2014). *Metode Sejarah (edisi revisi)*. Bandung: YMSI.
- Nasution, A. (1983). *Financial Institutions and Policies in Indonesia*. Singapore: ISEAS (Institute of South East Asian Studies).
- Pikiran Rakyat. (2017, Maret 23). Bedanya Fikiran Rajat, Pikiran Rakjat, dan Pikiran Rakyat. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2017/03/23/bedanya-fikiran-rajat-pikiran-rakjat-dan-pikiran-rakyat-396970>.
- Pikiran Rakyat. (2019, Maret 24). Sejarah Pikiran Rakyat Sejak 1967. Diakses dari <https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/03/24/sejarah-pikiran-rakyat-sejak-1966>
- Said, T. (1998). *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers dan Pancasila*. Jakarta: CV Haji Masagung.
- Sakti Alamsyah Siregar. (2019). Diakses dari https://1.bp.blogspot.com/-ram8p74VAmA/WJ8l2Tnm0oI/AAAAAAABdW/R9OIxw_1o-0i0Q9bmLktFXzMx_MtZs0QwCLcB/s1600/image001.png.
- Semma. (2008). *Sejarah Pers di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.
- Sjahril, T. & Sjureich, M. (1971). *Garis Besar Perkembangan Pers Indonesia*. Djakarta: SPS.
- Sjamsuddin, H. (2007). *Metodologi Sejarah*. Yogyakarta: Ombak.
- Soebagijo, I. N. (1977). *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers.
- Sudiby. (2004). *Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta.
- Suwirta, A. (1999). Wacana Kritik Media: Kajian atas Harian Pikiran Rakyat. *Wacana: Jurnal Ilmu dan Kebudayaan*, No.2 (Oktober).
- _____. (2000a). Mengkritisi Peristiwa G-30-S Tahun 1965: Dominasi Wacana Sejarah Orde Baru dalam Sorotan. *Historia: Jurnal Pendidikan Sejarah*, 1(1).
- _____, A. (2000b). *Suara dari Dua Kota: Revolusi Indonesia dalam Pandangan Surat Kabar Merdeka (Jakarta) dan Kedaulatan Rakjat (Yogyakarta), 1945-1947*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- _____. (2008). Dinamika Kehidupan Pers di Indonesia pada Tahun 1950-1965: Antara Kebebasan dan Tanggung Jawab Nasional. *Jurnal: SOSIOHUMANIKA*, 1(2), hlm. 261-294.
- Taufik, I. (1977). *Sejarah dan Perkembangan Pers di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Trinity Press.
- Tim LSPP. (2005). *Media Sadar Publik*. Jakarta: Lembaga Studi dan Pembangunan.

